



PERAN PENDIDIKAN VOKASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Muhammad Iqbal

Universitas Airlangga

muhammad.iqbal-2019@feb.unair.ac.id

Article Info

Article History:

Received Mar 02 th, 2022

Revised Jun 01 th, 2022

Accepted Jun 28 th, 2022

Available online on Jul 07, 2022

Keyword:

Vocational Education,

Islamic Economics

DOI: 10.35891/ml.v13i2.2965

Corresponding Author:

Muhammad Iqbal,

email: muhammad.iqbal-

2019@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of vocational education institutions in providing skilled workers who are ready to work in Islamic industries. The current development of the Islamic economy is encouraged to further promote Islamic economic practices through a number of industries such as the Islamic finance industry, halal food, halal pharmacy, and halal tourism. This research is a qualitative research with content analysis. Using secondary data from various documents and websites collected from various sources, we describe the role of vocational education in the development of the Islamic economy. The conclusion is that vocational education as applied education that uses a link and match approach, the author views that its role is very strategic in bridging the need for skilled workers in the sharia industry. This research is expected to encourage the implementation of vocational education to further contribute to the implementation of applied Islamic economics education.

Paper type: Literature review

MALIA CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serta lembaga pendidikan vokasi dalam penyediaan tenaga-tenaga terampil yang siap kerja di industri-industri syariah. Perkembangan ekonomi Islam saat ini didorong untuk lebih memasyarakatkan praktik ekonomi Islam melalui sejumlah industri seperti industri keuangan syariah, makanan halal, farmasi halal, dan pariwisata halal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan konten analisis. Menggunakan data sekunder dari berbagai dokumen dan website yang dikumpulkan dari berbagai sumber kami mendeskripsikan peran pendidikan vokasi dalam pengembangan ekonomi Islam. Kesimpulannya adalah pendidikan vokasi sebagai pendidikan terapan yang menggunakan pendekatan link and match penulis pandang sangat strategis perannya dalam menjembatani kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang industri syariah. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pendidikan vokasi untuk lebih berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan ekonomi Islam terapan.

Kata Kunci: Pendidikan Vokasi, Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Dalam tiga dekade terakhir, ilmu ekonomi Islam menunjukkan perkembangan yang pesat di dunia terutama di kawasan Asia. Ribuan riset telah dilahirkan oleh para sarjana ekonomi Islam semakin menguatkan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Hanya saja, sebagai sebuah sistem yang diharapkan menjadi solusi bagi kemaslahatan, praktik ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat belum mampu secara optimal mengimbangi praktik ekonomi konvensional yang telah berkembang sejak beberapa abad lalu.

Sebagai sebuah sistem yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, ekonomi Islam tumbuh secara parsial. Penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat muslim masih didominasi sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi sektor yang paling tumbuh dalam praktik ekonomi Islam, sementara sektor lain belum optimal menunjukkan eksistensinya.

Sekalipun sektor keuangan Islam tumbuh pesat dengan kehadiran bank-bank syariah di dunia, namun juga masih belum mampu merebut pasar konvensional. Hal ini juga berlaku di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Pasar keuangan masih di dominasi oleh bank-bank konvensional. Tabel berikut menunjukkan gap yang masih sangat lebar antara bankkonvensional dan bank syariah di Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Kegiatan Usaha Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbandingan Kegiatan Usaha Bank Konvensional dan Bank Syariah (Miliar)			
Keterangan		Bank Konvensional	Bank Syariah
Penyaluran Kredit		5.315.600	212.990
1	Kepada Pihak Ketiga	5.255.085	212.560
1a	Rupiah	4.459.814	206.284
1b	Valas	795.271	6.277
2	Kepada Bank Lain	60.514	429
2a	Rupiah	38.180	429
2b	Valas	22.334	-
Sumber Dana Pihak Ketiga		5.532.926	266.568
1	Rupiah	4.735.498	255.727
1a	Giro	1.042.343	34.250
1b	Tabungan	1.602.371	88.996
1c	Simpanan Berjangka	2.090.785	132.481
2	Valas	797.428	10.840
2a	Giro	325.012	4.931
2b	Tabungan	134.470	365
2c	Simpanan Berjangka	337.946	5.545

Sumber: OJK (diolah)

Tabel di atas menunjukkan ketimpangan yang masih lebar antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Ketimpangan ini nampak baik pada sisi penerimaan dana maupun pada sisi penyaluran dana. Padahal, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harusnya menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk bisa merebut pasar bank konvensional.

Di sektor yang lain seperti industri makanan halal, pariwisata halal, fashion muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan komestik halal, dan energi terbarukan masih jauh panggang dari api. Dibutuhkan upaya keras untuk bisa mewujudkan visi ekonomi syariah Indonesia: menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah tertemuka di Indonesia. Pencapaian visi tersebut melalui target capaian utama yaitu peningkatan skala usaha ekonomi syariah, peningkatan peringkat dalam *Islamic Economic Index*, peningkatan kemandirian ekonomi, dan peningkatan indeks kesejahteraan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Dalam upaya untuk pencapaian visi dan target tersebut, perlu untuk segera memetakan persoalan yang menghambat perkembangan praktik ekonomi syariah. Sejumlah faktor yang diidentifikasi menghambat industri keuangan syariah di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016) antara lain:

1. Kurangnya visi dan koordinasi diantara pemangku kepentingan.
2. Kurangnya dukungan pemerintah untuk industri.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat umum dan sektor bisnis.
4. Relatif rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
5. Konsentrasi pada industri keuangan pada pasar ritel.
6. Isu kapasitas dalam hal variasi produk, persaingan harga, system IT, tingkat pelayanan, dan distribusi.
7. Kurangnya likuiditas.
8. Sumber pendanaan terbatas.
9. Kurangnya pengawasan.
10. Kurangnya transparansi dan tata kelola.

Dari uraian faktor penghambat tersebut di atas, fokus penelitian ini adalah keterbatasan SDM dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dua hal ini bertalian yang menurut penulis merupakan faktor penting yang harus segera diselesaikan dalam upaya memasyarakatkan ekonomi syariah.

Harus diakui bahwa saat ini, Indonesia masih mengalami keterbatasan SDM yang menekuni ekonomi Islam. Jumlah institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam masih sangat sedikit. Pendidikan

ekonomi Islam umumnya diselenggarakan oleh universitas. Masih sangat sedikit lembaga pendidikan vokasi (politeknik) yang membuka prodi terkait dengan ekonomi Islam. Maka dapat dipahami kenapa pengembangan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin jauh lebih pesat dibandingkan penerapan ekonomi Islam itu sendiri, Harusnya, ekonomi Islam sebagai sebuah praktik perlu ditopang oleh tenaga terampil yang tidak lain merupakan sarjana terapan lulusan pendidikan vokasi.

Hasil observasi di sejumlah kantor bank syariah, posisi-posisi yang membutuhkan keterampilan teknis semisal *front line* di bank-bank syariah seperti teller, *customer service* masih diisi oleh pegawai yang bukan sarjana ekonomi Islam. Posisi *front line* sangat penting kedudukannya dalam mengedukasi masyarakat terkait layanan keuangan syariah. Hal ini sangat berhubungan dengan faktor penghambat lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah. Sebagian masyarakat masih menganggap keuangan syariah tidak ada bedanya dengan keuangan konvensional dikarenakan kegagalan para *front liner* dan tenaga marketing dalam menjelaskan kepada masyarakat (nasabah dan calon nasabah).

Demikian halnya di sektor lain, semisal industri halal, farmasi halal, fesyen halal masih sangat minim tenaga terampil yang memahami *Islamic world view*. Padahal peran mereka tidak hanya sebagai pekerja tapi juga sebagai barisan terdepan dalam mensosialisasikan ekonomi Islam. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan lembaga pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam. Dengan adanya lembaga pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam baik itu perbankan syariah, makanan halal, pariwisata halal, fesyen Islami maka ketersediaan tenaga terampil untuk mengisi pekerjaan di industri syariah akan membantu memsyaratkan ekonomi Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. *Human Investment Theory*

Pengembangan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari aspek pembangunan manusia. *Human capital* merupakan variabel penting yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi Islam ke depan memerlukan pengorbanan ekonomi berupa investasi di bidang pembangunan manusia

Jika ingin bersaing dan merebut pasar yang telah dikuasai oleh dengan industri konvensional, maka industri keuangan syariah, makanan

halal, pariwisata halal dan sektor industri syariah lainnya harus berinvestasi pada pembangunan manusia yang benar-benar menguasai landasan dan praktik ekonomi Islam. Investasi pada intellectual capital akan membantu industri dalam proses penciptaan nilai (*value creation*) atau meningkatkan kemampuan manajemen dalam mengkonversi *potential value* menjadi real value bagi perusahaan (Costa & Santos, 2016).

Investasi intellectual capital dapat dilakukan dalam skala mikro oleh perusahaan melalui serangkaian pelatihan bagi karyawan dan dapat juga dilakukan dalam skala makro oleh negara melalui penyediaan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Dalam lingkup mikro, industri yang berinvestasi pada intellectual capital baik melalui pelatihan akan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan (Kwon, 2019). Dalam skala makro, hasil penelitian menunjukkan pengaruh intellectual capital terhadap pembangunan dan progres berbagai sektor ekonomi (Noonejad, 2009).

2. Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menyajikan peserta didik penguasaan keterampilan atau keahlian terapan. Berbeda dengan pendidikan akademik yang menekankan pada penguasaan pengetahuan, pendidikan vokasi lebih menekankan pada penguasaan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jenjang pendidikan vokasi di Indonesia mulai dari program Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4) atau Sarjana Terapan, dan Magister Terapan.

Pada negara yang memiliki populasi penduduk yang besar dan berdampak pada ketersediaan tenaga kerja yang melimpah maka pendidikan vokasi sangat dibutuhkan untuk memberikan keahlian pada tenaga kerja agar diterima di lingkungan industri. Berbagai riset menunjukkan peran besar pendidikan vokasi terhadap kemajuan ekonomian sebuah negara seperti yang terjadi di Pakistan (Nooruddin, 2015), Liberia (Omata & Takahashi, 2018), dan beberapa negara di Eropa seperti Austria, Switzerland (Schmillen, 2018).

Dalam perkembangannya, model pendidikan vokasi Jerman yang populer di dunia. Model pendidikan vokasi Jerman menggunakan sistem dual system yang mengkombinasikan antara magang di industri dan instruksi di kelas. Kombinasi antara pemagangan di industri dengan pembelajaran di kelas akan menghasilkan sarjana terapan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal inilah yang menjadikan Jerman sebagai benchmark penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Namun demikian, perjalanan pendidikan vokasi di beberapa negara bervariasi. Ada yang berhasil menerapkan ada pula yang masih kesulitan dalam mencari format terbaik. Di Kuwait, sekalipun pendidikan vokasi memberi dampak positif dalam pengurangan pengangguran namun masyarakat masih memandang pendidikan vokasi sebagai "a second-best education system" (Bilboe, 2011). Demikian juga pada beberapa negara di Asia, sebagian menunjukkan hasil positif sebagian lainnya, pendidikan vokasi tidak mendapat respon yang cukup baik (Agrawal, 2013). Jepang, Singapura, dan Korea Selatan adalah contoh negara yang berhasil menerapkan sistem pendidikan vokasi. Sementara Indonesia Malaysia, Filipina, Thailand, dan Srilanka cukup baik, Yang cukup buruk dalam penerapannya adalah Bangladesh, China, India, Myanmar, Nepal, dan Pakistan (Agrawal, 2013).

Pendidikan vokasi di Indonesia dijalankan dengan mengadopsi pendekatan pendidikan berbasis kompetensi (*competence-based education/CBE*). Pendidikan berbasis kompetensi sebagai kontra dari pendidikan berorientasi pengetahuan (*knowledge-oriented education*) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, skill, pengembangan perilaku profesional mahasiswa melalui pendidikan yang menggunakan konteks dunia kerja (Biemans et al., 2009; Misbah, Gulikers, Dharma, & Mulder, 2019)

Dalam perkembangannya pendidikan vokasi di Indonesia terus direvitalisasi agar dapat berperan optimal dalam menopang revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, politeknik sebagai institusi pendidikan penyelenggara pendidikan vokasi diharapkan mengembangkan tiga hal berikut (Direktorat Pembelajaran Kemristekdikti, 2016):

1. Pendidikan vokasi politeknik selaras dengan program pengembangan ekonomi nasional.
2. Pendidikan vokasi politeknik menghasilkan lulusan yang mampu merespon dinamika kebutuhan pasar kerja.
3. Pendidikan vokasi politeknik mampu menghasilkan karya nyata yang bernilai atau berkontribusi ekonomis.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kami menggunakan analisis konten terhadap berbagai data sekunder yang kami peroleh dari berbagai sumber. Data-data tersebut berupa laporan instansi terkait, website dari kampus, serta dokumen lainnya yang kami pandang penting untuk dijadikan sebagai data penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peta Kebutuhan Industri Berbagai Sektor Dalam Ekonomi Islam

Kebutuhan Sumber daya manusia untuk pengembangan ekonomi Islam masih sangat besar hingga saat. Sementara supply tenaga kerja dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi Islam masih sangat terbatas. Ketidakseimbangan supply dan permintaan tenaga kerja di sektor ekonomi syariah baik di sektor keuangan, makanan halal, fesyen syariah, pariwisata halal menyebabkan masuknya lulusan sarjana ilmu konvensional untuk mengisi kekosongan kebutuhan kerja tersebut. Misalnya saja, di sektor keuangan syariah, sebagian besar pegawai perbankan syariah adalah lulusan non ekonomi Islam.

Subbab ini akan menguraikan peta kebutuhan sumber daya manusia ekonomi Islam. Karena cakupan praktik ekonomi Islam yang sangat luas, maka penelitian ini membatasi hanya menyajika 3 sektor industri syariah, yaitu perbankan syariah, makanan halal, dan pariwisata halal.

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Bank Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Berikut data Bank Syariah yang disadur dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 2. Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah		KP/KPO/KK	KCP	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	22	4
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
4	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	0
5	PT. Bank BRISyariah	50	205	12
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT. Bank BNI Syariah	68	203	16
8	PT. Bank Syariah Mandiri	129	426	55
9	PT. Bank Mega Syariah	27	33	8
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	14	4	0
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
12	PT. BCA Syariah	14	11	17
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	0
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	0	0

Unit Usaha Syariah				
15	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	9	1	0
16	PT Bank Permata, Tbk	11	2	1
17	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	13	2	0
18	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	15	0	3
19	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10	0	0

Keterangan: KP (Kantor Pusat), KPO (Kantor Pusat Operasi), KC (Kantor Cabang), KK (Kantor Kas); Sumber: OJK (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan jumlah kantor bank syariah di seluruh Indonesia. Jika membandingkan dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia saat ini yang berjumlah 514 kabupaten/kota maka hanya Bank Mandiri Syariah yang memiliki 129 kantor pusat/kantor pusat operasi/kantor cabang, 426 kantor cabang pembantu dan 55 kantor kas. Atau dapat dikatakan jangkauan layanannya telah sampai ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, belum ada kantor bank umum syariah maupun unit usaha syariah yang mampu membuka kantor ke setiap kabupaten/kota.

Ke depan, dibutuhkan langkah ekspansif untuk memberikan layanan perbankan syariah ke seluruh pelosok negeri agar masyarakat semakin familiar dengan bank syariah. Langkah ekspansif tersebut tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang cukup. Oleh karena itu, pasar kerja keuangan syariah masih akan terus tumbuh seiring dengan upaya untuk menggalakkan memasyarakatkan bank syariah ke seluruh penjuru negeri.

Data per juni 2019, jumlah tenaga kerja Bank Syariah di Indonesia meliputi 53.089 orang di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta 5.085 orang yang bekerja pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2. Industri Makanan Halal (*Halal Food industry*)

Industri makanan halal saat ini berkembang pesat di beberapa negara. Populasi penduduk muslim yang terus bertambah dan menyebar ke berbagai penjuru bumi adalah peluang besar tumbuh kembang industri makanan halal. Pada beberapa negara seperti Malaysia, industri makanan halal terus dipacu untuk beranak melalui sejumlah paket kebijakan dan ditopang berbagai riset ilmiah.

Populasi umat Islam yang terus bertumbuh dan kesadaran religiusitas yang semakin berkembang mendorong mereka untuk selalu mempertimbangkan aspek haram dan halal dalam setiap aktivitas mereka termasuk dengan konsumsi makanan. Industri makanan halal menyediakan

alternatif bagi umat muslim yang ingin mengkonsumsi makanan halal ditengah maraknya penawaran secara terbuka akan makanan haram.

Hanya saja industri makanan halal membutuhkan transparansi tentang kehalalan makanan tersebut. Baik dari sisi kandungan makanan maupun dari proses penyajian makanan tersebut. Karena makanan halal bukan hanya soal kandungannya tapi juga soal prosesnya. Seekor ayam yang halal bisa menjadi haram jika disembelih tidak dengan mengucapkan “Basmalah”.

Oleh karena itu, industri makanan halal tidak tumbuh secara parsial. Integrasi rantai nilai (supply chain integration) industri makanan halal dibutuhkan untuk menghubungkan supplier bahan baku, penyedia makanan halal dan konsumen. Tuntutan transparansi supplier dan proses penyediaan makanan oleh industri hingga sampai ke konsumen menjadi landasan kuat dibutuhkan integrasi rantai nilai pada industri makanan halal. Hal ini sejalan dengan penelitian Chandra, Liaqat, & Sharma, 2019 yang meneliti supply chain integration industri makanan halal di Malaysia.

“Firms nowadays competing for intra-supply chain rather than between companies, it is a prime time for the managers to seriously consider the SCI as the strategy of going forward. The halal food industry is relatively new compared to other industry such as manufacturing, electrical, etc. The trends have shown how SCI may play an important role for the firm in improving performance.”
(Chandra, Liaqat, & Sharma, 2019)

Oleh karena itu, rantai nilai industri makanan halal tidak hanya di seputar perusahaan produsen makanan melainkan sebuah ekosistem bisnis yang terdiri dari berabagai industri pendukung. Berikut ini disajikan rantai nilai dan industri pendukung yang dibutuhkan dalam ekosistem makanan halal:

Tabel 3. Rantai Nilai Industri Makan Halal

Rantai Nilai	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan Baku	<ul style="list-style-type: none">• Industri Pertanian Halal• Industri Peternakan Halal• Industri Perkebunan Halal• Industri Perikanan dan Hasil Laut	<ul style="list-style-type: none">• Industri Riset dan Pengembangan Produk Halal• Asosiasi

Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi Pengolahan • Rumah Potong Hewan • Teknologi Pertanian Bioindustri 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Riset dan Pengembangan • Lembaga Pendidikan
Manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Makanan Kemasan • Industri Minuman Kemasan • Pengolahan daging dan Makanan Laut • Pengolahan Sereal, Tepung, Kakao • Pengolahan Sayuran, Kacang, Buah • Residu Limbah Industri Makanan • Industri Perlengkapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Riset dan Pengembangan • Asosiasi • Lembaga Pendidikan
Saluran Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengemasan • Industri Pengangkutan Darat • Jasa Pengiriman Barang 	
Retailer	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-Commerce</i> • <i>Retail Store</i> • Pameran • Media • Restoran 	
Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Perbankan Syariah • IKNB Syariah 	

Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)

Tabel di atas menunjukkan rantai nilai industri makanan halal membuka peluang tumbuh dan lahirnya industri-industri utama dan pendukung. Kesemua industri tersebut membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan keterampilan di masing-masing industri juga ditopang oleh pemahaman akan syariah Islam yang baik.

3. Industri Farmasi Halal

Kebutuhan jaminan produk halal selain sektor makanan, juga yang menjadi perhatian publik saat ini adalah sektor farmasi. Beberapa waktu lalu terjadi polemik terkait dengan salah satu produk vaksin yang

direkomendasi pemerintah ditengarai memiliki kandungan bahan haram. Kontroversi ini semakin menguatkan tuntutan untuk mengadakan produk obat-obatan halal.

Mengingat industri ini belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia dan peluang tumbuhnya sangat sebanding dengan potensi pasar Indonesia yang mayoritas beragam muslim, maka perlu untuk mengkaji potensi industri dan kebutuhan tenaga kerja sektor farmasi halal. Sebagaimana sektor makanan halal, sektor farmasi halal juga berdiri dengan rantai nilai (*value chain*) yang terintegrasinya berbagai industri. Berikut ini disajikan rantai nilai farmasi halal beserta industri yang dibutuhkan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018):

Tabel 3. Rantai Nilai Industri Makan Halal

Rantai Nilai	Industri Utama	Industri Pendukung
Bahan Baku	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kimia Hulu • Industri Kimia Organik • Industri Kimia Anorganik 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Riset dan Pengembangan • Asosiasi
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi Pendeteksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Riset dan Pengembangan • Lembaga Pendidikan
Manufaktur	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Kimia Hilir 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Riset dan Pengembangan • Asosiasi • Lembaga Pendidikan
Saluran Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengemasan • Industri Pengangkutan Darat • Jasa Pengiriman Barang 	
Retailer	<ul style="list-style-type: none"> • <i>E-Commerce</i> • <i>Retail Store</i> • Apotek • Media 	
Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Perbankan Syariah • IKNB Syariah 	

Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018)

4. Industri Pariwisata Halal

Konsep pariwisata halal mengemuka seiring dengan semakin tingginya minat berwisata umat muslim. Kebutuhan akan pariwisata halal dilandasi produk layanan berbagai lokasi pariwisata yang bertolak belakang

dengan nilai-nilai Islam. Lantas, apa yang dimaksud dengan pariwisata halal? Berikut beberapa kutipan pengertian pariwisata halal.

“Halal tourism refers to the provision of a tourism product and service that meets the needs of Muslim travelers to facilitate worship and dietary requirement that conform to Islamic teachings. Halal tourism is therefore the type of tourism that adheres to the values of Islam, and in that sense comparisons might be made with the growth of Islamic banking practices in that both permit members of the faith to successfully be part of the contemporary world in ways consistent with their values and practices.” (Mohsin, Ramli, & Alkhulayfi, 2016)

“Halal tourism is considered as a subcategory of religious tourism. The word Halal comes originally from Arabic language meaning: allowable, acceptable, permitted, and/or permissible. This word is the main source for the concept of Halal which is not only related to food or food products (as most people will expect or think), but it goes beyond food to cover all the aspects of a Muslim person life (male or female)” (El- Gohary, 2016)

Berdasarkan dua kutipan di atas, dapat disimpulkan pariwisata halal merupakan sebuah konsep pariwisata yang diterima atau bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Pariwisata halal di Indonesia merupakan sesuatu yang baru dan masih membutuhkan pengembangan baik dari sisi konsep maupun implementasinya. Sekalipun masih baru namun sejumlah riset yang dihasilkan oleh para peneliti dapat menjadi acuan dalam pengembangan industri pariwisata halal.

Penyediaan pariwisata halal tidak hanya dapat dilakukan oleh entitas swasta namun juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah. Berikut ini rantai nilai industri pariwisata halal beserta kebutuhan industri/aktor utama dan pendukungnya:

Tabel 4. Rantai Nilai Industri Pariwisata Halal

Rantai Nilai	Industri Utama	Pendukung
Distributor	<ul style="list-style-type: none">• Rumah Produksi Film• TV dan Radio• Penerbitan• Provider aplikasi• Industri Musik dan Seni	<ul style="list-style-type: none">• SDM• <i>Research and Development</i>• HaKI• Royalti Distribusi• Teknologi• Marketing

Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan Syariah • IKNB Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Syariah Compliant
Investor	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Waqaf, sukuk, <i>crowd funding</i>, modal ventura syariah
Inkubator	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Inkubasi Bisnis • Jasa Inkubasi Teknologi • Jasa Inkubasi Campuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkubator Universitas • Inkubator Perusahaan • Corporate University
Festival Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pagelaran Seni Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen Seni dan Budaya • Asosiasi Seni

Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018) (diolah)

2. *Link and Match* Pasar Tenaga Kerja Sektor-Sektor Industri Ekonomi Islam

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan kebutuhan industri di beberapa sektor dalam pengembangan ekonomi Islam. Pengembangan industri-industri tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum Islam tetapi juga keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Persoalan yang ada saat ini adalah sebagian besar yang mengisi pasar kerja di industri- industri syariah adalah tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan konvensional bahkan ada juga yang menempati posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Hal ini tentu menjadi kendala dalam proses pengembangan industri syariah ke depannya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam harus didukung oleh ketersediaan pasokan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan skill sesuai dengan kebutuhan industri.

Perguruan tinggi memiliki peran besar untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja tersebut, terutama perguruan tinggi vokasi. Konsep yang ditawarkan oleh pendidikan vokasi adalah *link and match* antara kebutuhan tenaga kerja industri dan supply calon tenaga kerja dari institusi pendidikan. Konsep ini sangat ideal untuk menjadi solusi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia di industri-industri syariah.

Di era bonus demografi saat ini dimana ketersediaan angkatan kerja melimpah seharusnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk diantaranya pertumbuhan sektor industri syariah. Namun, faktanya kontribusi sektor industri syariah masih kecil bila dibandingkan dengan ekonomi industri konvensional.

Sejumlah riset menguraikan beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan industri syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Demikian juga dengan laporan yang terdapat dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah, keterbatasan kinerja SDM menjadi variabel penghambat pertumbuhan keuangan syariah. Sementara data statistik menunjukkan jumlah pengangguran kita masih sangat tinggi.

Anomali ini ditengarai karena tidak adanya keterbuhungan (mismatch) antara industri dan lembaga pendidikan. Lulusan perguruan tinggi banyak yang mengalami pengangguran karena skill mereka bukan yang dibutuhkan oleh industri. Kinerja industri syariah juga tidak optimal karena keterbatasan SDM yang memiliki skill sesuai yang dibutuhkan memaksa mereka untuk menerima saja lulusan perguruan tinggi yang sekalipun latar belakang keilmuannya jauh dari industri syariah. Konsekuensinya mereka harus mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk biaya pelatihan agar dapat bekerja di sesuai dengan pekerjaan di industri syariah.

Dengan kata lain, jika ingin memacu kinerja industri syariah di Indonesia maka perlu disiapkan institusi pendidikan yang mendukung hal tersebut. Industri pendidikan yang menyediakan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri syariah. Bukan sekedar pemahaman teoretis, tapi keterampilan teknis atau skill yang siap digunakan dalam industri syariah.

Ketidaksesuai antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan di industri syariah bisa menyebabkan pekerja di industri keuangan syariah banyak yang mengundurkan diri dari pekerjaan mereka bila menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan keilmuan dan ekspektasinya.

Oleh karena itu, sangat mendesak bagi perguruan tinggi vokasi untuk menyediakan program studi yang dapat menopang keberlanjutan industri syariah. Jika kemampuan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan vokasi bersesuaian dengan jenis pekerjaan yang mereka geluti di dunia kerja nantinya, para pekerja bekerja jauh lebih profesional dengan motivasi. Penelitian Bol, Ciocca Eller, van de Werfhorst, & DiPrete (2019) menemukan adanya korelasi antara penghasilan seorang dengan kekuatan linkage pendidikan dengan pekerjaan mereka.

“We find a (modest) positive association between the linkage strength of an educational program and the earnings of full-time workers who finish school in that program. On average, workers with tertiary educational credentials providing clear pathways to the labor market receive higher wages. Second, we find that

graduates who end up working in a “matching” occupation do particularly well. Or, put differently, our models predict that workers who end up in an occupation that has no clear match with their educational credential obtain, on average, lower earnings.”
(Bol et al., 2019)

Temuan penelitian Bol et al (2019) menegaskan bahwa profesionalisme sangat ditopang oleh hubungan yang kuat antara pekerjaan dengan keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan. Islam sangat menekankan profesionalisme dalam bekerja sebagai hadits Rasulullah SAW: “Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”.

Setelah kita memahami pentingnya link and match antara kebutuhan industri dengan supply tenaga kerja dari lembaga pendidikan. Maka pertanyaan berikutnya, kompetensi seperti yang diharapkan oleh industri-industri syariah? Muhammad (2003) dalam artikelnya menguraikan bahwa pengembangan SDM dalam industri syariah harus dibangun dalam ruang manajemen yang disebutnya dengan istilah “manajemen ihsan”. Tiga fokus manajemen ihsan yang dijelaskan oleh adalah (Muhammad, 2003):

- a. Aturan yang sederhana untuk menciptakan kemudahan dan focus dalam bekerja.
- b. Ketepatan waktu.
- c. Ditangani oleh orang yang professional.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja dalam industri syariah adalah sidiq, tabliq, amanah, fathonah (Karim 2002 dalam Muhammad, 2003). Tiga nilai dasar tersebut menjadi prasyarat awal bagi mereka yang ingin berkerja di lingkup industri syariah. Selanjutnya, pekerja di bidang industri Islam harus memiliki minimal dua pengetahuan/keahlian berikut:

- a. Pemahaman terhadap hukum Islam (ilmu syariah)
- b. Keterampilan/keahlian terkait dengan bidang industri yang digelutinya (ekonomi, lembaga keuangan, pariwisata, farmasi, makanan).

Dua keahlian ini harus ada dalam diri setiap pekerja di lingkup industri syariah. Problemnya, sangat sedikit orang yang menguasai ini. Tenaga kerja kita yang tersedia, sebagian besar hanya menguasai ilmu syariah karena berlatar belakang sarjana agama atau hanya menguasai ilmu ekonomi, keuangan, pariwisata, dan makanan saja karena mereka keluaran program studi ilmu konvensional.

Oleh karena itu, upaya untuk memajukan industri syariah harus ditopang dengan hadirnya lembaga pendidikan yang mampu menyatukan dua keahlian tersebut dalam diri setiap lulusannya. Sehingga kita akan menghasilkan tenaga-tenaga kerja professional di bidang industri syariah.

3. Peran Pendidikan Vokasi

Pada level perguruan tinggi, pendidikan vokasi di Indonesia diselenggarakan oleh Politeknik. Peran politeknik dalam menopang kebutuhan tenaga kerja di industri selama ini cukup signifikan. Bahkan beberapa BUMN ternama di Indonesia membuka formasi khusus untuk lulusan politeknik, Salah satu contohnya, PT PLN (PERSERO) yang membuka kelas kerja sama dengan beberapa politeknik di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka.

Namun, di sektor industri-industri syariah masih belum nampak peran besar pendidikan vokasi membantu pemenuhan kebutuhan tenaga kerja industri syariah. Saat ini, masih bisa dihitung jari jumlah politeknik yang membuka program studi yang berhubungan dengan industri syariah. Berikut ini data program studi ekonomi syariah jenjang pendidikan vokasi:

Tabel 5. Jumlah Program Studi Lingkup Ekonomi Syariah di Indonesia

Nama Prodi	Jenjang	Jumlah
Perbankan Syariah/ Manajemen Keuangan Syariah	D3	41
Perbankan Syariah/ Manajemen Keuangan Syariah/ Akuntansi Syariah	D4	4
Perbankan Syariah/ Manajemen Keuangan Syariah/ Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah	S1	411
Pariwisata Syariah	D3	0

Sumber: (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019)

Penyelenggaraan pendidikan ekonomi Islam berdasarkan tabel di atas masih sangat minim dilaksanakan di jenjang pendidikan vokasi. Sebagian besar pendidikan ekonomi Islam/ syariah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan akademik (universitas/institut/sekolah tinggi). Bahkan program studi keuangan/perbankan/manajemen keuangan syariah pada level D3 bukan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan vokasi murni (politeknik) melainkan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan

akademik (universitas/institut/sekolah tinggi). Pada lembaga pendidikan vokasi murni (politeknik) hanya terdapat tiga (3) program studi jenjang D4 yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah, yaitu:

- a. Program Studi D4 Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Bandung.
- b. Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- c. Program Studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah di Politeknik Negeri Medan.
- d. Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Politeknik Negeri Banjarmasin.

Khusus untuk program studi pariwisata syariah jumlah program studi yang menyelenggarakan ini masih kecil. Penyelenggaraannya pun masih dilaksanakan oleh lembaga pendidikan akademik di bawah naungan kementerian agama padahal kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan pariwisata halal sangat besar ke depannya.

Sementara itu khusus untuk pengembangan industri farmasi halal dan industri makanan halal belum ada saat ini lembaga pendidikan yang secara spesifik menyelenggarakan pendidikan farmasi maupun tata boga yang berbasis syariah. Tuntutan pasar untuk penyediaan produk farmasi dan makanan yang halal adalah keharusan untuk menyediakan sumber daya manusia yang ahli di di kedua bidang tersebut (farmasi dan tata boga) juga pemahaman yang baik tentang hukum Islam.

Oleh karena itu, ke depan masih sangat diharapkan peran besar lembaga pendidikan vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian berbasis syariah. Dengan demikian, harapan untuk membangun ekosistem halal dalam masyarakat ekonomi kita dapat segera terwujud.

E. KESIMPULAN

Pengembangan ekonomi Islam ke depan sudah mulai harus bergeser ke upaya memasyarakatkan ekonomi Islam. Penguatan kapasitas dan skala industri-industri yang berkenaan dengan ekonomi Islam masih harus terus dipacu dalam rangka mewujudkan ekosistem halal di tengah masyarakat. Mengacu pada berbagai temuan riset sebelumnya yang mengemukakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia adalah variabel yang turut menghambat pengembangan industri-industri syariah di berbagai sektor (keuangan syariah, makanan halal, farmasi halal, dan pariwisata halal), penelitian ini berupaya untuk menyajikan solusi permasalahan keterbatasan SDM di industri-industri syariah dengan mendorong peran serta lembaga pendidikan vokasi.

Pendidikan vokasi memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan akademik karena tujuan penyelenggaraan pendidikan vokasi adalah menyediakan lulusan yang terampil dan siap kerja sesuai kebutuhan industri. Konsep link and match pada lembaga pendidikan vokasi sangat tepat untuk menjembatani kebutuhan industri syariah akan tenaga professional yang ahli dibidangnya dan paham akan ilmu Islam.

Temuan penelitian ini masih sangat rendah kontribusi lembaga pendidikan vokasi terhadap ekonomi Islam. Politeknik sebagai lembaga pendidikan belum banyak yang membuka program studi yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Saat ini baru empat (4) politeknik yang membuka program studi yang berhubungan dengan ekonomi Islam dan semuanya adalah masih seputar keuangan, akuntansi, dan perbankan syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam menyediakan sumber daya manusia yang terampil dengan keahliannya, berakhlak mulia, dan paham akan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2019). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Retrieved from <https://forlap.ristekdikti.go.id/prodi>
- Kwon, K. (2019). The long-term effect of training and development investment on financial performance in Korean companies. *International Journal of Manpower*.
- Misbah, Z., Gulikers, J., Dharma, S., & Mulder, M. (2019). Evaluating competence-based vocational education in Indonesia. *Journal of Vocational Education and Training*, 00(00),1–29.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19(2016), 137–143.
- Muhammad. (2003). Kualifikasi Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syari'ah. *Al-Mawarid*, 10.
- Noonejad, M. E. and M. (2009). The Role of Human Capital on The Development and Progress of Various Sectors in Iran Economy. *Research Journal of Environmental Toxicology*, 3(3),113–123.

- Nooruddin, S. (2015). Technical and Vocational Education and Training for Economic Growth in Pakistan. *Journal of Education and Educational Development*, 2(2), 191–201.
- Omata, N., & Takahashi, N. (2018). Promoting the economic reintegration of returnees through vocational training: lessons from Liberia. *Development in Practice*, 28(8), 1022–1033.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Perbankan Indonesia. In *Otoritas Jasa Keuangan* (Vol. 17).
- Schmillen, A. (2018). Vocational education, occupational choice and unemployment over the professional career. *Empirical Economics*, 1–34.

